

AUDIT TANGGUNGJAWAB SOSIAL BAGI SUATU PERUSAHAAN

Suyatmin & Nursiam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

In this global era, it has happened thought changes in society about company social responsibility. People require companies to be more responsible in social and this must be taken into consideration in policy making.

Social responsibility audit is a management activity systematically carrying out an inspection to the whole social responsibility field both inside and outside of the company as an unseparatedly part forms an operational and strategy planning process.

Social responsibility checking is carried out on the basis of selected field of the existing priority both inside or outside of the company social responsibility field so that will be got a detail analysis of the strongness and weakness based on the established standard to be reported to management side.

The final product of the social responsibility audit is a report on reporting of audit finding. Social responsibility audit report involving objectives, scope, weakness finding as well as proposed recommendation that can be used to be the consideration for the management side to carry out improvement in line with the company power.

Keywords: method, concept, social audit, social responsibility

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perusahaan dan industri telah banyak mengakibatkan munculnya persoalan yang secara langsung berkenaan dengan kepentingan pemilik modal. Keberadaan suatu perusahaan sesungguhnya tidak dapat dipandang dari keberadaan usahanya semata, tetapi juga bagaimana perusahaan memperhatikan faktor lingkungan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan operasinya selain memperhatikan tujuannya juga harus memperhatikan situasi lingkungannya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengembangan tersebut. Hal ini

merupakan tanggungjawab sosial perusahaan, karena kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat profitabilitas saja, tetapi juga memiliki kewajiban dan keharusan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial sebagai dampak dari kegiatan industrinya.

Audit sosial dapat dikatakan tumbuh dari adanya rasa ketidakpuasan masyarakat akibat dari semakin berkembangnya jangkauan kegiatan perusahaan, sehingga seringkali terjadi persinggungan antara nilai-nilai lingkungan masyarakat dengan kepentingan perusahaan. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah produksi, pengerahan buruh di bawah umur, gaji buruh di bawah UMR, perampasan tanah penduduk untuk kawasan industri, penggelapan pajak dan sejenisnya merupakan gambaran adanya persinggungan tersebut. Audit sosial diarahkan terhadap masalah-masalah tersebut yang dalam istilah lain melakukan penilaian apakah suatu organisasi perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

Audit tanggungjawab sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektifitas program perusahaan yang bersifat sosial dan melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggungjawab sosialnya. Suatu informasi internal dan eksternal memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber-sumber daya dan dampaknya (baik sosial maupun ekonomi), oleh karena itu pada prinsipnya audit tanggungjawab sosial timbul dalam upaya memenuhi ketentuan informasi bagi pihak-pihak selain pemilik dan kreditur, maka ruang lingkup audit tanggungjawab sosial diarahkan ke berbagai bidang yang menjadi tujuan sosial.

PERMASALAHAN

Agar pembahasan dalam makalah ini lebih terarah, maka perlu ditetapkan langkah-langkah yang diambil dengan merumuskan permasalahan. Oleh karena audit tanggungjawab sosial perusahaan belum banyak dibahas, maka dapat dirumuskan: "Bagaimana konsep dan metode yang tepat dalam melaksanakan audit tanggungjawab sosial".

PEMBAHASAN

A. Pengertian Audit Tanggungjawab Sosial

Menurut John Humble, audit tanggungjawab sosial adalah:

"Pemeriksaan secara sistematis dan secara keseluruhan kebijakan dan praktek yang berlaku mengenai tanggungjawab sosial di dalam dan di luar perusahaan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dan operasional".

Dengan demikian secara ideal suatu perusahaan dengan sistem perencanaan strategis dan operasional yang mantap akan mengamati semua bidang pokok seperti: produktifitas, bagian pasar dan sebagainya serta menentukan sasaran di bidang tersebut demi profitabilitas jangka panjang. Demikian halnya dengan bidang pokok tanggungjawab sosial juga akan diperiksa secara wajar dan sepenuhnya. Pada umumnya audit tanggungjawab sosial ini menghasilkan laporan yang disusun dan disebarluaskan serta menguraikan tentang program sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan dan ditetapkan untuk diumumkan. Laporan atas audit tanggungjawab sosial biasanya ditambahkan dalam laporan keuangan, tetapi dengan semakin bertambahnya perhatian terhadap tanggungjawab sosial, maka pelaporan atas audit ini dilakukan secara terpisah.

Pendapat audit tanggungjawab sosial menurut Sofyan Safri Harahap, menjabarkan bahwa audit sosial sebagai suatu tindakan pemantauan, penilaian dan pengukuran prestasi perusahaan dalam kaitanya dengan masalah-masalah sosial.

Audit ini mencakup bidang-bidang:

1. Pemberian lowongan kerja, apakah telah adil.
2. Produksi.
3. Keselamatan Kerja.
4. Penggajian.
5. Lingkungan hidup.
6. Pensiun dan sumbangan hari tua.
7. Sumbangan sosial

B. Ruang Lingkup Audit Tanggungjawab Sosial

Ruang lingkup atau cakupan atas audit tanggungjawab sosial meliputi bidang-bidang pokok perusahaan sebagai bidang terpilih untuk dianalisis, yakni bidang tanggungjawab sosial.

Bidang Pokok Perusahaan	Bidang Terpilih untuk analisis	Bidang Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Pembaharuan - Produktifitas - Kedudukan pasar - Sumber-sumber keuangan dan fisik - Karya dan pengembangan manajer - Karya dan sikap pekerja - Tanggungjawab sosial 	Tanggungjawab sosial	<p><u>Lingkungan Luar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab dan peluang baru 2. Hubungan dengan masyarakat 3. Hubungan dengan konsumen 4. Pencemaran 5. Pengemasan 6. Hubungan dengan investor 7. Hubungan dengan pemegang saham <p><u>Lingkungan Dalam</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fisik 2. Kondisi kerja 3. Golongan minoritas 4. Struktur organisasi dan gaya manajemen 5. Komunikasi 6. Hubungan perburuhan 7. Pendidikan dan latihan

C. Standar Pelaksanaan Audit Tanggungjawab Sosial

Standar dapat merupakan suatu pedoman pelaksanaan, sekaligus sebagai acuan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar dapat meliputi tujuan yang harus dicapai, strategi dan rencana dasar yang lebih luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuannya dan juga memuat kebijakan atau metode yang digunakan oleh manajemen untuk menuntun secara rutin pengambilan keputusan.

Dalam upaya audit tanggungjawab sosial standar yang berlaku tidak baku artinya tidak ada standar yang baku dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini standar berimplikasi pada relevansi dari tiap-tiap bidang pokok tanggungjawab sosial perusahaan. Karakteristik, ruang lingkup serta kondisi setiap perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam keterlibatannya atas tanggungjawab sosial.

Pengertian yang cukup memadai dalam hal ini adalah bahwa standar pelaksanaan dapat dibagi menjadi dua macam: (1) standar internal dan (2) standar eksternal.

- **Standar internal**

Standar internal didefinisikan sebagai acuan yang bersumber dari dalam perusahaan. Dalam bidang tanggungjawab perusahaan, standar pelaksanaan audit ini adalah strategi dan kebijakan perusahaan yang dituangkan dalam perencanaan dalam bidang tanggungjawab sosial.

Perencanaan mencakup tujuan yang hendak dicapai, strategi serta kebijakan dan juga rencana untuk pengendalian. Berangkat dari tujuan audit ini adalah mengevaluasi, mengukur, menganalisis sampai sejauh mana keterlibatan sosial perusahaan dalam bidang ini guna mencapai efisiensi dan efektifitas serta kemanfaatan yang dapat dicapai sesuai dengan rencana operasional yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu standar internal audit adalah rencana dan kebijakan dalam bidang tanggungjawab sosial.

- **Standar Eksternal**

Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh institusi yang berkepentingan dengan keberadaan satuan usaha yang berdampak sosial atau pada lingkungan sosial. Standar yang ditetapkan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pemerintah dalam bidang ini, antara lain:

1. Undang-undang tentang keselamatan kerja
2. UU No.4 th.1982, yang dituangkan dalam Keppres No. 51 th.1983 tentang AMDAL
3. PP.No.29 th.1986, mengenai analisa dampak lingkungan
4. Adanya pengaturan penebangan hutan dan tata guna tanah
5. Adanya lembaga gerakan kebersihan dan reboisasi

Dengan dikeluarkannya peraturan perundangan telah disebutkan di atas dapat mendorong perusahaan untuk dan harus mentaatinya. Resiko dan kelalaian atau sengaja yang sifatnya melawan ketentuan tersebut pada akhirnya menjadi tanggungjawab perusahaan.

Untuk lebih mengoptimalkan audit ini auditor perlu memahami isi penting peraturan atau standar yang berlaku, misalnya:

- Syarat-syarat yang mengatur pendirian perusahaan yang tidak mengganggu lingkungan
- Syarat-syarat keselamatan kerja dan kewajiban pengusaha dan hak tenaga kerja
- Syarat-syarat perlindungan lingkungan hidup
- Ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan sosial

Peraturan serta persyaratan yang melindungi kepentingan sosial bagi pihak pendirian maupun keberadaannya setelah beroperasi menjadi standar internal bagi audit ini. Keterlibatan auditor dalam hal ini tidak dapat dihindarkan, permasalahan serta kendala di atas menuntut kehadiran pihak luar sebagai konsultan pemeriksa yang membantu auditor dalam hal ini, misalnya ahli biokimia sehingga dapat memperkuat serta memperjelas temuan untuk dilaporkan kepada pihak manajemen.

D. Tahap-tahap Pemeriksaan

Penyelidikan khusus yang dilakukan, data yang diuji dan teknik yang diterapkan tergantung pada organisasi yang diaudit. Meskipun demikian pekerjaan secara profesional dan obyektif dapat dilaksanakan dan pelaporan haruslah wajar, lengkap dan reflektif dengan kondisi yang diaudit.

■ Usulan dan Pengenalan

Untuk memperoleh manfaat yang maksimum atas organisasi yang diaudit seharusnya tidak memandang pemeriksaan tanggungjawab sosial dari sudut pandang yang kritis dan negatif. Pertemuan awal auditor dengan pihak manajemen sangat membantu dalam menetapkan hubungan antara mereka selama fase audit. Selama ini auditor mengenal tujuan organisasi secara keseluruhan agar dapat menilai setiap aktifitas, fungsi serta unit dalam organisasi. Berdasarkan hal ini, auditor harus memperoleh pemahaman tentang tujuan organisasi yang diaudit.

■ Survei Pendahuluan

Fase ini auditor melakukan penilaian pendahuluan atas aktifitas yang diuji, pertanyaan yang relevan harus diajukan kepada manajemen operasi dan operasi aktual harus diamati. Harus diperoleh informasi data keuangan dan statistik, rencana, anggaran dan pengukuran lain

serta sistem pelaporan yang dipercayai oleh manajemen untuk memonitor kinerja.

■ **Penelaahan Pendahuluan**

Merumuskan dan mendesain suatu program kerja yang rinci untuk audit yang lebih mendalam.

■ **Pengujian Rinci**

Selama tahap ini kemutakhiran, kelengkapan dan aturan data akan ditetapkan. Tujuan secara keseluruhan untuk mengidentifikasi area yang akan menjadi perhatian manajemen. Pengujian audit yang lebih rinci dapat dilakukan:

1. Apakah sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam anggaran telah diotorisasi?
2. Apakah informasi penting dapat dipercaya dan tersedia bagi manajemen tepat waktunya dan apakah informasi tersebut digunakan?
3. Apakah biaya aktifitas operasional secara wajar sepadan dengan manfaat yang dicapai?
4. Apakah aktifitas operasional mencapai hasil yang dimaksudkan?

■ **Mengembangkan dan Menelaah Temuan Audit**

Dalam menilai kinerja operasional, hal utama yang diperlukan adalah mendefinisikan standar operasional atau kriteria penilaian (*Operational Standart or Criteria for Appraisal*). Auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai aktifitas yang diaudit agar dapat mengembangkan kriteria evaluasi yang memadai.

Auditor khususnya harus dapat memastikan bahwa:

1. Standar tersebut realistis dan dapat dicapai oleh personil yang ditelaah.
2. Unit pengukuran dapat secara obyektif ditentukan dan dikenal oleh penyelia dan karyawan.
3. Standar tersebut dapat diterima oleh manajemen maupun karyawan.

Standar yang digunakan dalam pemeriksaan tanggungjawab sosial perusahaan dapat diperoleh dari organisasi itu sendiri atau industri dimana perusahaan tersebut beroperasi. Standar tersebut mencakup daftar tujuan, kebijakan, prosedur atau pedoman. Dalam menetapkan temuan audit, diperlukan analisis yang cermat terhadap kondisi dan keadaan yang diidentifikasi. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa terdapat kondisi yang dapat dilaporkan dan signifikan adalah menelaah secara kritis

semua bukti yang mendukung semua unsur temuan. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada unsur berikut:

1. Kondisi, keadaan atau praktek yang diidentifikasi dan memberikan kontribusi lebih kecil dari hasil yang diinginkan.
2. Kriteria, sasaran, tujuan, standar, aturan, peraturan atau petunjuk lain yang tidak tercapai.
3. Penyebab praktek yang hasilnya kurang dari yang diharapkan.
4. Dampak material, kerusakan atau biaya yang timbul akibat kinerja yang tidak diinginkan.
5. Simpulan pendapat atau opini auditor atas situasi, keadaan atau praktek organisasi.
6. Rekomendasi tindakan korektif atau alternatif lain yang diusulkan akan meningkatkan kinerja yang lebih efektif.

Bila seluruh temuan telah dinilai, menjadi sangat penting bagi auditor untuk mendiskusikan temuan tersebut kepada pihak manajemen. Hal ini memberi peluang yang lebih jauh kepada auditor dalam menguji temuannya sebelum menyusun laporan akhir.

■ **Pelaporan**

Pelaporan merupakan tahap berikutnya dan biasanya merupakan tahap yang paling kritis dari pemeriksaan tanggungjawab sosial suatu perusahaan. Hal ini disebabkan tidak seperti pemeriksaan keuangan, keberhasilan suatu pemeriksaan tanggungjawab sosial sangat tergantung pada mutu laporan yang dihasilkan. Laporan pemeriksaan tanggungjawab sosial merupakan alat formal untuk memberikan manajemen puncak tentang temuan auditor yang signifikan serta rekomendasinya. Masalah atau temuan yang tidak signifikan sebaiknya tidak perlu dilaporkan. Hal ini dapat didiskusikan kepada pihak manajemen untuk segera diambil tindakan korektif jika dimungkinkan. Bila pihak manajemen dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka audit secara keseluruhan baru dapat dikatakan bermanfaat. Tujuan laporan audit antara lain memberikan informasi kepada manajemen, memprakarsai tindakan korektif dan menyediakan dokumentasi audit. Selain itu laporan yang dibuat untuk pihak manajemen eksekutif dan dewan komisaris melalui komite atau team audit memiliki dua tujuan yaitu mengkomunikasikan apa yang telah dikerjakan oleh pemeriksa intern (laporan kegiatan) dan menggambarkan apa yang telah ditemukan.

■ Tidak Lanjut Setelah Audit

Tujuan atas penelaahan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan, namun demikian bila manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, maka ditentukan penjelasan untuk kegagalan manajemen melakukan hal demikian.

E. Beberapa Pendekatan Pengukuran

Masalah pengukuran timbul dikarenakan adanya hal-hal yang tidak dapat diukur dengan menggunakan bentuk pengukuran yang digunakan sebagai denominator yakni satuan uang. Terdapat 3 pendekatan yang setidak-tidaknya dapat digunakan untuk mendominasi ukuran yang dapat dipakai dalam pelaporan audit tanggungjawab sosial, yaitu:

1. Pendekatan diskriptif
2. Pendekatan biaya
3. Pendekatan biaya manfaat

■ Pendekatan Diskriptif

Pendekatan diskriptif dipandang sebagai pendekatan yang biasa digunakan. Laporan sosial diskriptif pada umumnya mengandung isi uraian mengenai semua kegiatan sosial yang paling sederhana dan paling informatif. Laporan sosial diskriptif digunakan sebagai penyajian lampiran tahunan (termasuk di dalamnya laporan keuangan).

■ Pendekatan Biaya

Menggambarkan semua pengeluaran untuk setiap kegiatan sosial yang dilakukan dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan diskriptif, artinya apabila dalam pendekatan biaya yang dikeluarkan mengkuantifikasi semua uraian kegiatan dalam bentuk satuan uang.

■ Pendekatan Biaya Manfaat

Mengungkapkan baik biaya perusahaan maupun manfaat yang berhubungan dengan kegiatan sosial perusahaan. Hal ini mungkin merupakan pendekatan yang paling informatif dan tepat, namun dalam kenyataannya sulit untuk diterapkan dikarenakan adanya kesulitan mengukur manfaat. Pendekatan biaya yang dikeluarkan memiliki sisi kebaikan dalam hal bahwa pendekatan biaya ini dapat menggambarkan suatu daya banding (*comparability*), yaitu suatu tahun dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan komitmen keuangan bagi kegiatan sosial. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk

suatu kegiatan. Pendekatan biaya manfaat mempunyai kebaikan dalam hal menggambarkan baik biaya maupun manfaat sebagai hasil dilakukannya suatu kegiatan sosial, sebagai hasil atau manfaat suatu kegiatan yang dapat dilihat.

F. Alternatif Pengukuran dan Pelaporan

Untuk mengukur transaksi sosial, paling tidak dapat dikembangkan beberapa cara:

1. Harga pertukaran
2. Harga barang pengganti
3. Penelitian
4. Penilaian independen
5. Ketentuan atau keputusan pemerintah

1. Harga Petukaran

Dengan cara atau metode pertukaran, ukuran suatu pengorbanan atau manfaat dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengendalikan terjadinya pencemaran atau peralatan untuk keselamatan kerja bagi perusahaan. Hal ini merupakan pengorbanan yang nilainya sebesar harga yang dibayarkan untuk memperoleh peralatan tersebut.

2. Harga Barang Pengganti

Digunakan untuk menilai sesuatu yang tidak dapat secara langsung ditentukan hasilnya. Oleh sebab itu untuk mengukur sesuatu yang tidak ada ukurannya atau nilainya di pasar, maka digunakan ukuran dengan sesuatu yang lain dari yang tidak ada ukuran atau nilainya di pasar. Misalnya sesuatu yang tidak ada ukurannya atau nilai di pasar: *Pendidikan dan Kesehatan*.

3. Penelitian

Metode penelitian dianggap sebagai metode yang relevan dalam pembahasan mengenai harga bayangan, yaitu untuk sesuatu yang tidak harganya di pasar. Metode ini mendasarkan harga sesuatu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait.

4. Penilaian Independen

Merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak yang independen, seorang yang dianggap ahli. Dalam hal ini penilai independen menilai suatu dampak yang terjadi, baik dengan menggunakan teknik penelitian maupun dengan menetapkan suatu barang pengganti atau dengan teknik lain yang menurutnya relevan dan dapat diterima

5. Ketentuan atau Keputusan Pemerintah

Mengukur suatu dampak yang terjadi berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah, misalkan penetapan ganti rugi melalui putusan pengadilan dalam bentuk denda atau sanksi baik secara langsung maupun melalui kewajiban memperbaiki kerusakan ataupun bentuk atas dampak lainnya sehingga menjadi seperti semula.

G. Rekomendasi

Rekomendasi mencakup tindakan korektif atau alternatif yang diusulkan dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi atau kelemahan yang ada. Rekomendasi yang diusulkan oleh auditor dalam pemeriksaan tanggungjawab sosial perusahaan akan membimbing manajemen agar bertindak lebih efektif dan efisien pada sasaran yang telah ditetapkan dari keterlibatan perusahaan dalam bidang tanggungjawab sosial. Rekomendasi juga meliputi tindakan terpilih atas bidang terpilih yang sedang dianalisis. Rekomendasi yang diusulkan mungkin tidak langsung ditindaklanjuti oleh manajemen, artinya pihak manajemen enggan untuk melaksanakannya karena kondisi tertentu yang mendasari keputusan tersebut. Mungkin juga rekomendasi ulang diusulkan hanya dan baru dilaksanakan sebagian saja karena keterbatasan dana atau biaya pelaksanaannya, misalnya pembuatan sarana pengolahan limbah yang memenuhi standar ambang batas pencemaran.

Penelaahan tindak lanjut atas rekomendasi yang diusulkan akan dapat diketahui sebab-sebab yang mendasari pihak manajemen tidak melakukan atau bertindak sesuai dengan rekomendasi yang diusulkan. Lebih dari itu, penelaahan tindak lanjut dapat dilakukan sekitar 6 bulan setelah penerbitan laporan audit. Hal ini memberikan peluang bagi auditor untuk memperoleh umpan balik atas efektifitas dan juga setiap kesulitan yang dialami dalam implementasi rekomendasi audit.

KESIMPULAN

Atas dasar pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewasa ini telah terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. Masyarakat menuntut perusahaan agar lebih bertanggungjawab secara sosial dan menuntut masalah ini sebagai masalah yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
2. Audit tanggungjawab sosial merupakan kegiatan manajemen yang secara sistematis melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bidang tanggungjawab sosial di dalam maupun di luar perusahaan sebagai

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis dan operasional. Dengan audit tersebut dapat dianalisis kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat diambil suatu rencana perbaikan jangka pendek maupun jangka panjang yang dipusatkan pada prioritas yang telah ditetapkan dan dibuat seimbang dengan tujuan lain serta diintegrasikan dalam prosedur perencanaan dan pengendalian dari organisasi secara keseluruhan.

3. Bidang tanggungjawab sosial telah menjadi bagian integral dari bidang-bidang pokok lainnya dalam perusahaan. Pemeriksaan atas bidang pokok profitabilitas, pembaharuan, karya pengembangan manajer serta sumber daya manusia relevan dilakukan oleh auditor internal perusahaan, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi. Begitu pula dengan bidang tanggungjawab sosial, hal ini disebabkan terintegrasi dengan bidang pokok lainnya dalam perusahaan, maka audit di atas bidang ini sangat relevan untuk menjadi bagian tugas auditor intern. Dalam pemeriksaan atas bidang ini auditor dapat melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki kepentingan dalam perusahaan, sehingga didapatkan diagnosis yang lebih baik atas masalah-masalah yang penting untuk segera diselesaikan. Prosedur yang dilalui dalam pemeriksaan, manajemen dapat diterapkan dalam pemeriksaan tanggungjawab sosial perusahaan, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemeriksaan tanggungjawab sosial dilakukan atas bidang terpilih dari prioritas yang ada, baik yang ada di lingkungan dalam maupun luar bidang tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga didapat analisis yang mendalam atas kekuatan dan kelemahan berdasarkan standar yang ditetapkan untuk dilaporkan kepada pihak manajemen.
5. Produk akhir atas audit tanggungjawab sosial adalah laporan atau pelaporan hasil temuan audit. Laporan audit tanggungjawab sosial dapat mencakup tujuan, ruang lingkup (scope), temuan kelemahan serta rekomendasi yang dapat diusulkan untuk kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan.
6. Tindak lanjut rekomendasi dalam audit ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan secara umum. Di sisi lain pencapaian secara optimal atas bidang ini diharapkan akan dapat meningkatkan citra perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga bermanfaat dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan tanpa mengabaikan perhatian pada bidang pokok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Martin, 1989. *Social Accounting in Behavioral*, diterjemahkan oleh Siegel Ramanuaska, Cincinnati, Ohio, South-Western.
- Gray, E.R and Smetzerlt, 1981. *The Competitive the alling Environment Social Responsibility and Managerial Athies*, Milan: McMillan Publishing Company.
- Kusumoatmojo, Sarwono, 1996. *Usahawan: Peranan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan*, No.10/th.XX, Jakarta: Lembaga Manajemen FE UI.
- Lee Kuhre, W., ISO 1410S, 1996. *Environmental Auditing*, Jakarta: Prentice Hall.
- Umansyah, 1988. *Akuntansi Sosial: Telaah Alternatif dan Kemungkinan Pengembangan di Indonesia*, Edisi Khusus, Yogyakarta, BPFE YKPN.
- _____. 1989. *Akuntansi: Telaah Alternatif Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban di Indonesia*, No.10, Yogyakarta: BPFE YKPN.